

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perubahan kurikulum pendidikan merupakan suatu tuntutan yang harus dilakukan demi perbaikan kualitas sumber daya manusia pada suatu bangsa. Kurikulum dengan segala perubahannya tentu saja tidak dapat terlepas dari dunia pendidikan. Pendidikan yang baik akan menciptakan pola pikir, sikap dan karakter yang baik pula bagi manusianya. Hal ini senada dengan yang dijelaskan Widyastono (Kepala Bidang Kurikulum dan Badan Perbukuan Balitbang Kemendikbud) bahwa apabila mutu lulusan baik, dapat diprediksi bahwa mutu kegiatan belajar mengajar, input siswa, kompetensi pendidik, sarana prasarana, pengelolaan dana, manajemen dan lingkungan sudah memadai (Widyastono, 2015:7). Peran kurikulum dalam kegiatan belajar mengajar, input siswa, kompetensi pendidik tersebut adalah sebagai pemberi arah untuk tercapainya tujuan pendidikan tertentu.

Sejak zaman kemerdekaan hingga sekarang tercatat telah 11 kali Indonesia mengalami perubahan Kurikulum Pendidikan (Widyastono, 2015:54), yaitu 8 kali sebelum era otonomi daerah, dan 3 kali pada masa otonomi daerah hingga sekarang. Sebelum otonomi daerah tahun 1999, Indonesia telah mengalami 8 kali perubahan kurikulum yaitu; (1) Kurikulum 1947; (2) Kurikulum 1964; (3) Kurikulum 1968; (4) Kurikulum 1973 (Proyek Perintis Sekolah Pembangunan); (5) Kurikulum 1975; (6) Kurikulum 1984; (7) Kurikulum 1994; (8) Kurikulum 1999 (Kurikulum 1994 yang disempurnakan). Sementara itu pada masa otonomi daerah saat ini, Indonesia

mengalami 3 kali perubahan Kurikulum, yaitu: (1) Kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi/ KBK); (2) Kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/ KTSP); dan (3) Kurikulum 2013.

Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/ RPJMN 2010-2014 dan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan merupakan landasan bagi pengembangan Kurikulum 2013. Dalam pengembangannya, Kurikulum 2013 lebih menekankan pada keseimbangan antara kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan dan sikap peserta didik (Widyastono, 2015:119).

Pemberlakuan sebuah kurikulum pada dasarnya adalah pembaharuan pada sistem pendidikannya. Adanya suatu pembaharuan pada sistem perubahan didasari atas perubahan tuntutan pada aspek kehidupan. Tuntutan hidup dapat berubah karena adanya perubahan pada sosial budaya masyarakat yaitu perubahan pola hidup dan perubahan sosial politik (Sanjaya, 2011:60). Perubahan pola hidup terjadi karena adanya perubahan pada dalam tatanan masyarakat dari yang bersifat agraris tradisional menjadi industri modern. Widyastono (2015:31) menjelaskan bahwa masyarakat kini memiliki pola kerja yang teratur sesuai dengan pola kerja industri. Oleh karena itu perubahan kurikulum harus mampu membentuk manusia yang produktif yang tahu bekerja. Pola hidup masyarakat juga sangat bergantung pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan hasil-hasil teknologi. Oleh karenanya perubahan kurikulum harus mampu membentuk manusia produktif yang cerdas dan inovatif. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pola hidup masyarakat juga tergantung pada sistem perekonomian. Oleh sebab itu perubahan kurikulum harus

mampu membentuk manusia yang jauh dari hidup konsumtif. Perubahan tuntutan masyarakat terjadi juga disebabkan oleh perubahan sosial politik. Perubahan sosial politik yang dimaksud antara lain; semakin cepatnya arus globalisasi, perubahan pengelolaan pemerintahan yang lebih kepada otonomi daerah (desentralistik). Oleh karenanya perubahan kurikulum harus sejalan dengan arus globalisasi.

Muhammad Nuh dalam kata sambutannya pada perayaan Hari Pendidikan Nasional tanggal 02 Mei 2014 menyatakan bahwa Kurikulum 2013 dan implementasinya penting dilaksanakan untuk membekali peserta didik dengan tiga kompetensi utuh yaitu: sikap, pengetahuan dan keterampilan. Dengan ketiga kompetensi itu siswa Indonesia akan menjadi generasi yang kreatif, inovatif, produktif, mampu berpikir orde tinggi, berkarakter serta cinta dan bangga berbangsa Indonesia. Generasi emas inilah yang diharapkan terbentuk di tahun 2045 Indonesia nantinya. Generasi emas Indonesia 2045 ini yang diharapkan mampu membawa Indonesia berdaya saing dan unggul diantara bangsa-bangsa lain.

Menteri Pendidikan (Kemdikbud, 2013:74) menyatakan bahwa kurikulum 2013 yang dikembangkan adalah penyempurnaan dari kurikulum yang lama, diharapkan dengan adanya perubahan kurikulum ini maka tujuan pendidikan nasional dapat terwujud. Lebih lanjut dijelaskan bahwa tujuan tersebut akan diperoleh melalui beberapa tahapan terlebih dahulu, seperti penataan pola pikir dan tata kelola kurikulum, pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses, dan penyesuaian beban guru dan siswa. Penataan pola pikir pembelajaran, seperti: (1) pembelajaran menjadi terpusat pada siswa; (2) kegiatan siswa diarahkan kepada aktif menyelidiki dan berpikir kritis; (3) penggunaan multimedia dalam pembelajaran; (4) pembelajaran bersifat interaktif; (5) pengetahuan yang

multidisiplin, siswa dibentuk melihat permasalahan dari berbagai disiplin ilmu; (6) pembelajaran berbasis tim; dan (7) transfer ilmu pengetahuan dari berbagai sumber.

Tata kelola kurikulum dalam hal penyusunan kurikulum 2013 dimulai dengan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan yang berdasarkan atas kesiapan peserta didik, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan masyarakat (Kemdikbud, 2013:75). Selanjutnya kurikulum dibangun atas dasar kerangka kurikulum dan struktur kurikulum per tingkatan jenjang pendidikan. Pendalaman dan perluasan materi pelajaran didasarkan pada adanya data hasil tes standar Internasional di bidang IPA, Matematika dan Bahasa (PISA, TIMSS dan PIRLS) yang menunjukkan bahwa siswa Indonesia masih berada jauh dibawah negara-negara lain. Oleh karena itu perlu dilakukan pendalaman dan perluasan materi. Penguatan pada proses pembelajaran dilakukan dengan pendekatan saintifik. Menggunakan ilmu pengetahuan sebagai penggerak pembelajaran, mengarahkan siswa kepada mencari tahu (*discovery learning*) dan menekankan pada kemampuan berbahasa sebagai alat komunikasi dan menyatakan pendapat ilmiah.

Dalam hal penyesuaian beban guru dan siswa, pada kurikulum 2013 guru tidak perlu lagi menyusun silabus sendiri tetapi disediakan oleh pemerintah, guru hanya bertugas membuat RPP yang didasarkan pada silabus yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, pada kurikulum 2013 ini guru dan siswa diberikan buku pegangan yang telah disusun pemerintah dengan penekanan pada pendekatan saintifik dan penilaian autentik. Diharapkan dengan langkah seperti ini maka pemerataan pendidikan di Indonesia dapat terjadi, sehingga tidak terjadi lagi kesenjangan kemampuan siswa di daerah perkotaan dan di daerah pedesaan.

Tahun ajaran 2013/2014 adalah awal bagi kurikulum 2013 diimplementasikan secara bertahap dan terbatas di sekolah-sekolah sasaran. Secara bertahap berarti bahwa implementasi Kurikulum 2013 ini dilakukan tidak secara serempak di semua kelas, disetiap jenjang sekolah tetapi dimulai dengan kelas I dan IV untuk jenjang SD (Sekolah Dasar), kelas VII untuk SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan kelas X untuk SMA/K (Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan). Secara terbatas berarti bahwa penerapan Kurikulum 2013 ini hanya diimplementasikan pada sekolah-sekolah dengan kriteria tertentu, seperti: sekolah-sekolah bekas Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah-sekolah yang memiliki Akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah-Madrasah (BAN-SM). Pada awal implementasinya (Husnill dan Anugrah, 2015:5), terdapat 6.410 sekolah sasaran kurikulum 2013. Seluruh sekolah tersebut tersebar di 33 provinsi Indonesia mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA/SMK. Pada jenjang Sekolah Dasar (SD) terdapat 2.598 sekolah sasaran Kurikulum 2013. Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat 1.521 sekolah sasaran. Sebanyak 1.270 pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan pada jenjang SMK sebanyak 1.021 sekolah sasaran. Setiap tahunnya sekolah sasaran tersebut bertambah. Lebih lanjut, pemerintah melalui Kemendikbud merencanakan untuk tahun ajaran 2016/2017 jumlah sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013 akan mencapai 25%, kemudian pada tahun ajaran 2017/2018 menjadi 60% dan pada tahun 2019/2020 tercapai 100% sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013 ini.

Untuk Tahun Ajaran 2016/2017 Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan SK Penetapan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 melalui Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang

tertuang dalam SK Dirjen Dikdasmen No.375/KEP/D/KR/2016. Sebanyak 27.727 sekolah sasaran jenjang SD, 5.333 sekolah sasaran jenjang SMP, 2.049 sekolah sasaran jenjang SMA dan untuk jenjang SMK sebanyak 1.631 sekolah sasaran akan menerapkan Kurikulum 2013 untuk pertama kalinya.

SMA Negeri 7 Binjai sejak tahun 2013/2014 telah menjadi salah satu sekolah *pilot project* penerapan Kurikulum 2013 secara penuh. Ini berarti telah 3 tahun SMA Negeri 7 Binjai telah menerapkan Kurikulum 2013 ini. Dari informasi berdasarkan sebaran angket dan tanya jawab kepada 30 orang guru SMA Negeri 7 Binjai didapati informasi bahwa SMA Negeri 7 Binjai belum pernah melaksanakan evaluasi terkait implementasi kurikulum 2013. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, bahwa SMA Negeri 7 Binjai belum pernah dievaluasi terkait Penerapan Kurikulum 2013. Sekolah hanya mengawasi bagaimana Kurikulum 2013 ini diterapkan oleh guru-guru dan melakukan pelatihan-pelatihan setiap tahunnya. Dari hasil penelusuran lebih lanjut diketahui bahwa Permendikbud No. 159 Tahun 2014 tentang Evaluasi Kurikulum juga belum disosialisasikan sampai ke tingkat sekolah. Pihak sekolah masih menunggu arahan dan bimbingan dari Dinas Pendidikan mengenai bagaimana teknis evaluasi yang harus dilakukan.

Permendikbud No. 159 Tahun 2014 tentang Evaluasi Kurikulum pada pasal 10 mengharuskan untuk dilakukannya Evaluasi Kurikulum oleh Kementerian, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kanwil Kemenag, Kantor Kemenag Kab/Kota, Komite dan Dewan Pendidikan, Satuan Pendidikan dan Masyarakat guna perbaikan dan alat pengambilan keputusan kebijakan terkait Kurikulum 2013.

Pemerintah sebenarnya telah melaksanakan evaluasi atas Kurikulum 2013 pada tahun 2015, seperti yang dilansir dalam situs kemdikbud, Menteri Pendidikan Anies Baswedan menyatakan bahwa evaluasi kurikulum 2013 telah dilaksanakan dari 2 aspek saja yaitu desain kurikulum dan dokumen kurikulum. Artinya pemerintah pada tahun tersebut belum melakukan evaluasi atas implementasi kurikulum 2013. Hasil evaluasi ini kemudian menghasilkan beberapa perubahan dalam Kurikulum 2013 yang mulai diterapkan tahun 2016. Perubahan tersebut antara lain (Kurniasih dan Sani, 2016:7): (1) penyederhanaan sistem penilaian. Sistem penilaiannya dikembalikan dari sistem satuan (1-4) menjadi sistem puluhan (0-100); (2) penggunaan metode pembelajaran aktif, tidak lagi terbatas pada beberapa metode; (3) proses berpikir siswa yang tidak dibatasi, artinya siswa SD kini boleh berpikir sampai tahap penciptaan sesuai dengan kemampuannya; (4) meningkatkan hubungan antara Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar; (5) penerapan teori 5M-saintifik (mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis dan mencipta); dan (6) struktur mata pelajaran dan waktu belajar yang tidak berubah. Sebagai akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi pada Kurikulum 2013, kini Dinas Pendidikan dan Sekolah fokus pada sosialisasi perubahan tersebut.

Berdasarkan data awal yang diperoleh melalui angket yang dilakukan kepada 30 orang guru SMA Negeri 7 Binjai pada tanggal 19 dan 23 Januari 2017, diperoleh bahwa pada tahap persiapan pembelajaran maka beberapa guru (30%) tidak membuat sendiri RPP yang digunakannya, tetapi melakukan duplikasi dari RPP yang telah dibuat orang lain. Selebihnya, guru-guru menyusun sendiri dan/atau bersama-sama guru lainnya dalam MGMP, tetapi mereka tidak pernah mengetahui apakah RPP yang mereka susun telah sesuai atau belum. RPP yang

disusun oleh guru-guru lebih kepada kelengkapan administrasi dibandingkan sebagai pedoman guru dalam mengajar. Pada tahap penerapan Kurikulum 2013 dalam pembelajaran, diketahui bahwa guru-guru masih mengalami kesulitan untuk menerapkan pendekatan saintifik (63%). Dari hasil penelusuran lebih lanjut diketahui bahwa kesulitan tersebut disebabkan oleh: (1) buku kurikulum 2013 yang belum semua tersedia; (2) guru masih kesulitan mengaitkan pendekatan saintifik tersebut dengan topik materi pelajaran; dan (3) disebabkan oleh cara mengajar guru yang belum berubah. Pada tahapan evaluasi hasil belajar beberapa guru juga masih kesulitan melaksanakan penilaian autentik (93%) Hal ini disebabkan oleh: (1) banyaknya penilaian yang harus dilakukan guru; (2) banyaknya siswa yang harus dinilai; dan (3) perubahan sistem penilaian.

Dari hasil penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Kemendikbud pada tahun 2013 mengenai Evaluasi Pendampingan Kurikulum 2013 kepada guru sasaran (Puslitbang Kebudayaan, 2013:32) diketahui bahwa: (1) 73% guru menyatakan sangat memahami pembelajaran saintifik, tahapan pembelajaran saintifik dan memahami contoh kegiatan pembelajaran saintifik; (2) 74,28% sangat memahami penilaian autentik; (3) lebih dari 80% guru-guru memahami pembuatan RPP Kurikulum 2013; (4) 86,87% guru-guru memahami dan melaksanakan pembelajaran Kurikulum 2013; dan (5) sebanyak 90,29% guru melaksanakan penilaian autentik dengan benar. Apabila data tersebut dibandingkan dengan kenyataannya di SMA Negeri 7 Binjai maka terjadi banyak ketidaksesuaian. Ini berarti dalam 3 tahun penerapannya belum terjadi peningkatan dalam hal penerapan evaluasi kurikulum 2013 di SMA Negeri 7 Binjai. Hal ini diprediksi terjadi karena: (1) belum adanya evaluasi yang dilakukan secara internal di SMA Negeri 7 Binjai

sehingga tidak adanya bahan rekomendasi bagi pihak terkait untuk perbaikan dan peningkatan penerapan Kurikulum 2013 di SMA Negeri 7 Binjai; (2) belum adanya arahan dan pedoman evaluasi dari Dinas Pendidikan terkait Permendikbud No. 159 Tahun 2014 mengenai Evaluasi Kurikulum 2013, padahal peraturan ini mewajibkan setiap sekolah untuk melaksanakan evaluasi; (3) tidak adanya ukuran ketercapaian implementasi Kurikulum 2013 di setiap sekolah. Oleh karena itu perlu dilakukan Penelitian Evaluatif atas Implementasi Kurikulum 2013 di SMA Negeri 7 Binjai secara terencana, sistematis, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Penelitian evaluatif ini diberi judul “Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 di SMA Negeri 7 Binjai”

### **1.2. Fokus Penelitian dan Pembatasan Masalah**

Berdasarkan pemaparan permasalahan pada latar belakang, maka penelitian ini difokuskan pada evaluasi atas implementasi Kurikulum 2013 yang dilakukan oleh guru mata pelajaran di SMA Negeri 7 Binjai. Pada tahapan (a) *Antecedent* (Persiapan) meliputi: (1) pemahaman guru terhadap Kurikulum 2013; dan (2) perencanaan pembelajaran (RPP), pada tahapan (b) *Transaction* (Proses) meliputi: (1) pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan saintifik; dan (2) pelaksanaan penilaian autentik, pada tahapan (c) *Outcomes* (Hasil) meliputi hasil penilaian autentik.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus masalah yang telah dipaparkan, maka masalah pada penelitian evaluasi ini dirumuskan sebagai berikut “bagaimana implementasi kurikulum 2013 yang dilakukan oleh guru mata pelajaran di SMA Negeri 7 Binjai pada tahun ajaran 2016/2017 khususnya pada aspek berikut:

1. Tahap awal (*Antecedent*) yang meliputi:

- a) Bagaimana pemahaman guru mata pelajaran terhadap Kurikulum 2013 di SMA Negeri 7 Binjai tahun ajaran 2016/2017?
- b) Bagaimana perencanaan pembelajaran (RPP) yang disusun oleh guru mata pelajaran dalam Implementasi Kurikulum 2013 di SMA Negeri 7 Binjai tahun ajaran 2016/2017?

2. Proses Implementasi (*Transaction*) yang meliputi:

- a) Bagaimana pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dalam Implementasi Kurikulum 2013 di SMA Negeri 7 Binjai tahun ajaran 2016/2017?
- b) Bagaimana pelaksanaan penilaian autentik dalam Implementasi Kurikulum 2013 di SMA Negeri 7 Binjai tahun ajaran 2016/2017?

3. Hasil (*Outcomes*) yang meliputi:

- a) Bagaimana hasil penilaian autentik dalam Implementasi Kurikulum 2013 di SMA Negeri 7 Binjai tahun ajaran 2016/2017?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Penelitian Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 di SMA Negeri 7 Binjai tahun ajaran 2016/2017 ini dilakukan untuk mengetahui:

1. Tahap Awal (Tahap *Antecedent*) yang meliputi:

- a) Pemahaman guru mata pelajaran terhadap Kurikulum 2013 di SMA Negeri 7 Binjai tahun ajaran 2016/2017.
- b) Perencanaan pembelajaran (RPP) yang disusun oleh guru mata pelajaran dalam Implementasi Kurikulum 2013 di SMA Negeri 7 Binjai tahun ajaran 2016/2017.

2. Proses implementasi (Tahap *Transaction*) yang meliputi:

- a) Pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dalam Implementasi Kurikulum 2013 di SMA Negeri 7 Binjai tahun ajaran 2016/2017.
- b) Pelaksanaan penilaian autentik dalam Implementasi Kurikulum 2013 di SMA Negeri 7 Binjai tahun ajaran 2016/2017.

3. Hasil (Tahap *Outcomes*) yang meliputi:

- a) Hasil penilaian autentik dalam Implementasi Kurikulum 2013 di SMA Negeri 7 Binjai tahun ajaran 2016/2017.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian evaluasi ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

#### **1. Secara Teoritis**

- 1) Hasil penelitian evaluasi ini diharapkan dapat memperkaya konsep dan teori dari kurikulum 2013 dan evaluasi implementasi kurikulum 2013 yang berguna bagi pengelolaan dan pengembangan kurikulum dalam manajemen kurikulum.

#### **2. Secara Praktis**

##### **1) Bagi Guru**

- (a) Sebagai sumber informasi untuk dapat membantu guru untuk mencapai tujuan kurikulum 2013; (b) meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pengalaman guru untuk meningkatkan profesionalisme; serta, (c) meningkatkan kualitas dan kompetensi guru dalam melaksanakan kurikulum 2013 di sekolah.

## 2) Bagi Sekolah

- a. Sebagai penerapan atas Permendikbud 159 Tahun 2014 tentang Evaluasi Kurikulum;
- b. Bahan informasi dan rekomendasi yang bermanfaat bagi perbaikan dan pengembangan Implementasi Kurikulum 2013; serta
- c. Bahan untuk mengetahui ketercapaian Implementasi Kurikulum 2013.

## 3) Bagi Dinas Pendidikan

- a. Sebagai penerapan atas Permendikbud No. 159 Tahun 2014 tentang Evaluasi Kurikulum; dan
- b. Sebagai bahan informasi dan rekomendasi bagi pengambilan kebijakan terkait Kurikulum 2013 di tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

## 4) Bagi Peneliti Lain.

Sebagai sumber referensi bagi penelitian lainnya terkait Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013.